

BAB I

PENDAHULUAN

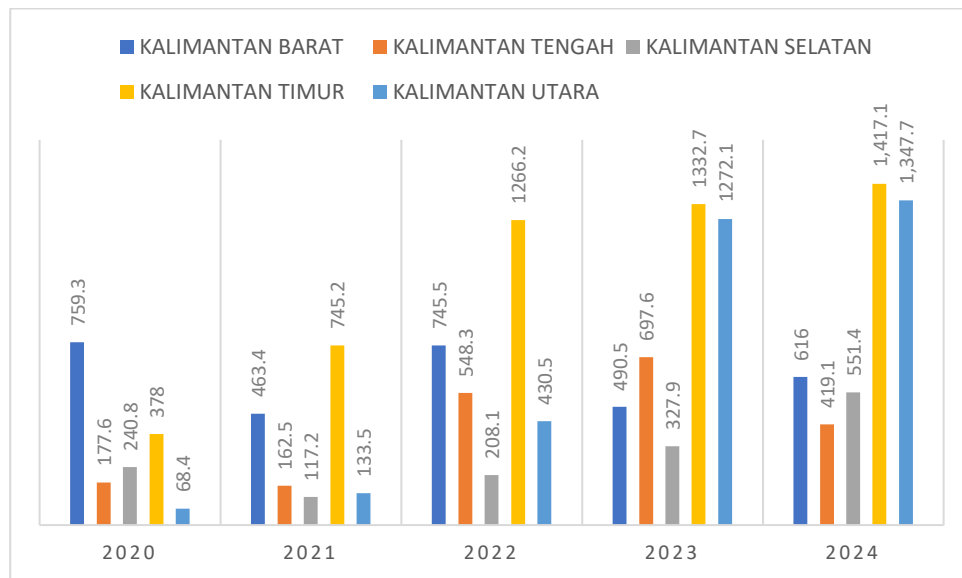
1.1 Latar Belakang Penelitian

Investasi merupakan salah satu komponen kunci dalam pembangunan ekonomi karena berfungsi sebagai penggerak utama akumulasi modal, perluasan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka *Investment Theory*, investasi dipahami sebagai keputusan penanaman modal yang dipengaruhi oleh ekspektasi keuntungan, tingkat risiko, serta stabilitas kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Peningkatan investasi akan memperbesar stok modal yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan output melalui efek pengganda (*multiplier effect*).

Pandangan tersebut diperkuat oleh Keynes (1936) yang menyatakan bahwa keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh ekspektasi pelaku usaha terhadap keuntungan di masa depan (*marginal efficiency of capital*) serta stabilitas kondisi makroekonomi. Dalam konteks ini, peran pemerintah lebih ditekankan pada kebijakan fiskal dan regulasi yang mampu menciptakan kepastian usaha serta menurunkan risiko investasi. Suparmoko (2009) juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil interaksi antara akumulasi modal dan tenaga kerja, sehingga investasi tidak hanya dipahami sebagai aliran dana, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi daerah.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow-Swan (1956), investasi ditempatkan sebagai determinan penting dalam pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi, baik yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi melalui penambahan modal dan adopsi teknologi. Dalam kerangka ini, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penunjang penting agar akumulasi modal dapat dioptimalkan. PMA memiliki peran strategis karena tidak hanya membawa tambahan modal, tetapi juga mendorong transfer pengetahuan dan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Sebaliknya, PMDN mencerminkan kekuatan ekonomi domestik dan tingkat kepercayaan pelaku usaha lokal terhadap prospek perekonomian wilayah, yang juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Teori investasi regional menjelaskan bahwa industri investasi antarwilayah cenderung tidak merata akibat perbedaan ukuran pasar, tingkat aktivitas ekonomi, ketersediaan dan kualitas tenaga kerja, serta kebijakan pemerintah daerah. Kondisi ini sering kali menimbulkan kesenjangan antara PMA dan PMDN, terutama di wilayah yang sedang mengalami transformasi ekonomi. Fenomena tersebut relevan dengan kondisi Wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, yang menjadi pusat perhatian investor seiring dengan penetapan wilayah tersebut sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).



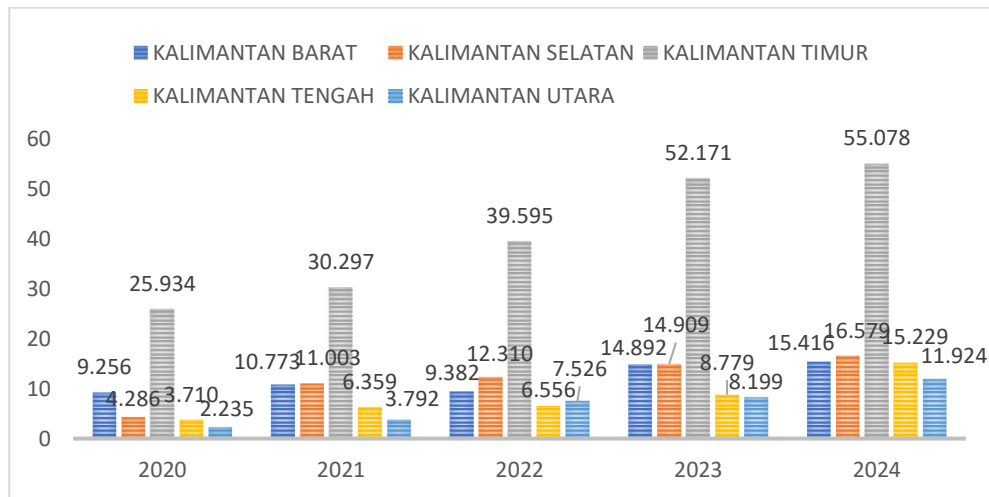
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah penulis 2025

Gambar 1.1 PMA di Wilayah Kalimantan Tahun 2020-2024 (Juta USD)

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Wilayah Kalimantan selama periode 2020-2024. Secara umum, PMA di Kalimantan memperlihatkan tren yang cenderung meningkat, dengan Kalimantan Timur sebagai provinsi penerima PMA terbesar dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi ini mencerminkan kuatnya daya tarik Kalimantan Timur bagi investor asing, terutama pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam dan aktivitas ekonomi berskala besar. Selain itu, penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) turut membentuk ekspektasi positif investor asing terhadap prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang di wilayah tersebut.

Namun demikian, dominasi PMA di Kalimantan Timur juga mengindikasikan adanya konsentrasi investasi asing yang relatif tinggi pada suatu wilayah, sementara provinsi lain di Kalimantan mengalami pertumbuhan PMA yang lebih moderat dan fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa aliran investasi asing masih bersifat selektif dan dipengaruhi oleh perbedaan potensi ekonomi serta

tingkat keuntungan yang diharapkan antarprovinsi. Dari sudut pandang teori investasi, kondisi ini mencerminkan perilaku investor asing yang cenderung memilih wilayah dengan prospek keuntungan tinggi dan risiko yang lebih terukur.



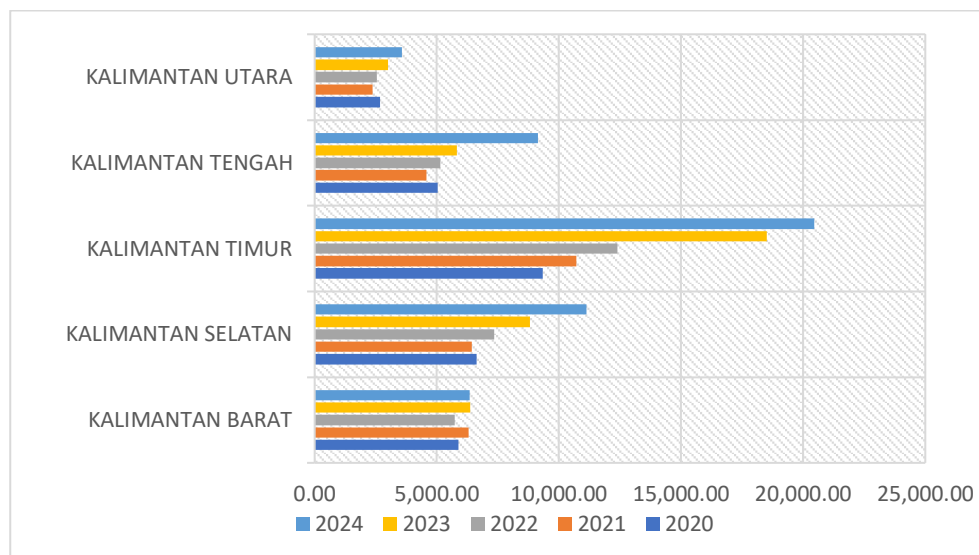
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah penulis 2025

Gambar 1.2 PMDN di Wilayah Kalimantan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Gambar 1.2 menggambarkan perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di lima provinsi di Wilayah Kalimantan selama periode 2020-2024. Dibandingkan dengan PMA, PMDN menunjukkan pola pertumbuhan yang relatif lebih berfluktuasi dan cenderung lebih rendah, khususnya di Kalimantan Timur. Meskipun peluang ekonomi di wilayah tersebut semakin besar, partisipasi investor domestik belum tumbuh secepat investor asing. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas modal, perbedaan persepsi risiko usaha, serta kesiapan pelaku usaha domestik dalam merespons peluang investasi.

Kesenjangan antara PMA dan PMDN di Kalimantan Timur mencerminkan fenomena *investment gap*, di mana pertumbuhan investasi lebih banyak didorong oleh modal asing dibandingkan modal domestik. Dari perspektif *Investment Theory*,

kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ekspektasi keuntungan di wilayah tersebut relatif tinggi, tidak seluruhnya dapat direspons secara optimal oleh investor domestik. Sementara itu, di provinsi Kalimantan lainnya, PMDN cenderung berperan lebih besar dalam menopang aktivitas ekonomi lokal, terutama pada sektor perdagangan, perkebunan, dan industri skala menengah.

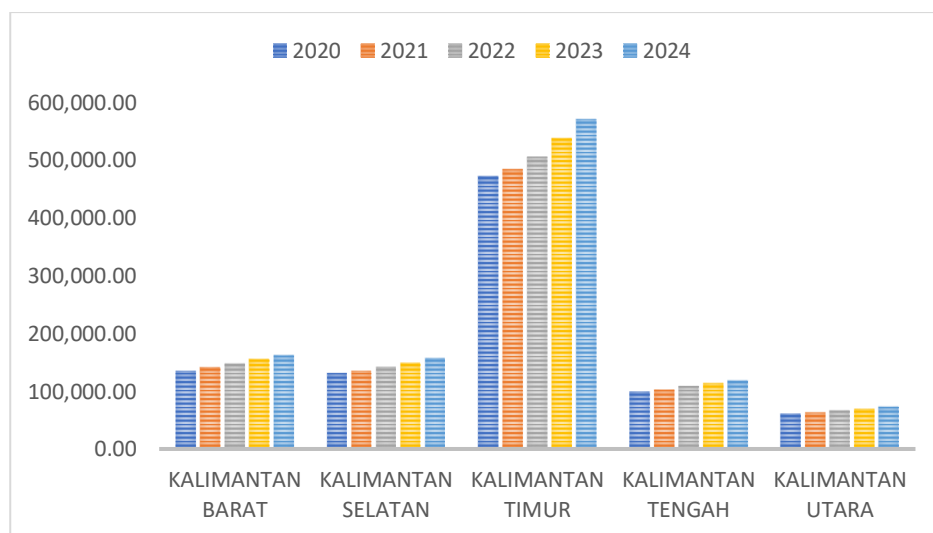


Sumber: Direktorat Jeneral Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah penulis 2025

Gambar 1. 3 Belanja Pemerintah di Wilayah Kalimantan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Gambar 1.3 menunjukkan perubahan belanja pemerintah di lima provinsi di Wilayah Kalimantan selama periode 2020-2024. Secara umum, belanja pemerintah di seluruh provinsi mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan penguatan peran fiskal pemerintah dalam mendorong pembangunan wilayah. Kenaikan yang terjadi pada 2021 dan 2022 terutama dipengaruhi oleh kebutuhan pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan percepatan pembangunan, khususnya di Kalimantan Timur yang menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada tahun 2023, sebagian provinsi mengalami sedikit

perlambatan belanja akibat penyesuaian anggaran dan restrukturisasi program kerja. Secara keseluruhan, pola kenaikan belanja pemerintah menunjukkan kehadiran pemerintah yang semakin kuat dalam menyediakan layanan publik dan fasilitas ekonomi yang diperlukan untuk mendukung peningkatan investasi di Wilayah Kalimantan. Secara teori, pada konsep *crowding in effect* menyatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah, khususnya pada belanja modal seperti pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi), dapat mendorong peningkatan investasi melalui serangkaian mekanisme ekonomi yang terjadi di sektor riil. Dengan demikian, besarnya pengeluaran pemerintah berperan penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung aktivitas investasi.

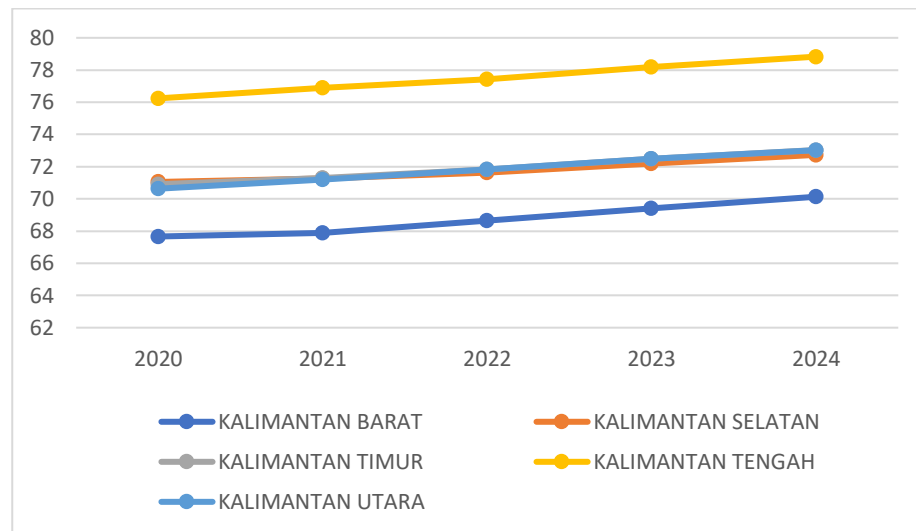


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah penulis 2025

Gambar 1.4 Produk Domestik Regional Bruto ADHK di Wilayah Kalimantan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Gambar 1.4 menggambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) pada lima provinsi di Wilayah Kalimantan selama periode 2020–2024. Secara keseluruhan, seluruh provinsi

menunjukkan tren peningkatan PDRB dari tahun ke tahun, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan perluasan kapasitas produksi regional. Provinsi Kalimantan Timur mencatat nilai PDRB tertinggi setiap tahunnya, mencerminkan dominasi sektor pertambangan dan energi yang menjadi kekuatan utama perekonomian wilayah tersebut. Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, terutama pada sektor perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian modern. Sementara itu, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara mengalami peningkatan yang relatif lebih moderat, namun tetap menunjukkan pola pertumbuhan positif seiring dengan pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Kenaikan PDRB di seluruh wilayah Kalimantan mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi dan produktivitas regional terus meningkat selama 2020–2024, meskipun sempat dipengaruhi perlambatan akibat pandemi Covid-19 pada awal periode tersebut. Berdasarkan teori *accelerator*, peningkatan PDRB akan mendorong peningkatan investasi melalui mekanisme peningkatan permintaan yang diikuti oleh kebutuhan untuk memperluas kapasitas produksi.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah penulis 2025

Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Kalimantan Tahun 2020-2024 (Persen)

Gambar 1.5 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lima provinsi di Wilayah Kalimantan selama periode 2020-2024. Secara umum, IPM di seluruh provinsi Kalimantan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan cenderung memiliki nilai IPM yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dan lebih siap mendukung aktivitas ekonomi serta investasi. Sementara itu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara menunjukkan tingkat IPM yang lebih rendah, meskipun tetap mengalami peningkatan secara bertahap selama periode pengamatan. Perbedaan tingkat dan laju pertumbuhan IPM antarprovinsi menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Wilayah Kalimantan belum sepenuhnya merata. Kondisi ini berpotensi memengaruhi daya tarik investasi, mengingat investor cenderung

mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja yang sehat, terdidik, dan produktif dalam menentukan lokasi penanaman modal.

Menurut teori pembangunan manusia Becker (1993), menyatakan bahwa manusia tidak hanya dipandang sebagai sumber daya, tetapi juga bentuk modal (*human capital*) yang mampu memberikan hasil atau pengembalian (*return*) atas setiap investasi yang dilakukan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui IPM menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan grafik di atas, terlihat bahwa dinamika PMA, PMDN, belanja pemerintah, PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Kalimantan menunjukkan perbedaan pola pertumbuhan dan intensitas antarprovinsi, baik dari laju pertumbuhan maupun stabilitas pergerakannya. Kalimantan Timur cenderung menunjukkan tingkat investasi dan aktivitas ekonomi yang relatif lebih tinggi dan konsisten, sementara provinsi lain memperlihatkan pertumbuhan yang lebih fluktuatif dan serta kualitas pembangunan manusia yang berbeda-beda. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun variabel ekonomi dan sosial yang diamati sama, pengaruhnya terhadap investasi tidak bersifat sama antarprovinsi. Dengan demikian, pemahaman mengenai bagaimana belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui IPM berperan dalam memengaruhi investasi baik PMA maupun PMDN menjadi sangat penting untuk dianalisis secara empiris. Dinamika tersebut menegaskan bahwa peningkatan investasi tidak hanya bergantung pada kapasitas

sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara faktor-faktor tersebut dengan investasi. Penelitian oleh Noviani dan Istifadah (2020) menemukan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap peningkatan investasi di Indonesia. Firdaus dan Suseno (2025) juga membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sementara itu, penelitian oleh Choirunnisa dan Khoirudin (2024) menunjukkan bahwa PDRB memiliki hubungan kuat terhadap daya tarik penanaman modal asing (PMA) daerah Jawa Tengah. Di sisi lain, studi oleh Dwitayanti et al. (2022) membuktikan bahwa peningkatan IPM mendorong peningkatan produktivitas yang berdampak pada nilai investasi di 34 provinsi di Indonesia.

Meskipun telah terdapat beberapa penelitian yang membahas determinan investasi di Indonesia, sebagian kajian tersebut masih berfokus pada wilayah nasional atau level provinsi saja, sementara penelitian yang secara khusus menelaah dinamika investasi di Kalimantan masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menganalisis satu jenis investasi baik PMA maupun PMDN atau menggunakan variabel ekonomi yang berbeda dengan cakupan tahun yang lebih pendek. Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian (*reseacrh gap*) karena masih jarang kajian secara simultan membandingkan pengaruh Belanja Pemerintah, PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kedua jenis

investasi tersebut dalam satu model analisis. Padahal berdasarkan kondisi empiris, PMA dan PMDN di Kalimantan menunjukkan karakteristik pertumbuhan yang berbeda, sehingga pendekatan komparatif menjadi sangat relevan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki *novelty* berupa penggunaan dua variabel dependen (PMA dan PMDN) secara terpisah namun dalam satu kerangka wilayah, periode data terbaru 2017-2024, serta fokus pada Kalimantan sebagai kawasan yang sedang mengalami transformasi ekonomi akibat pembangunan strategis nasional. Hal inilah yang menjadikan penelitian ini penting dan berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini terletak pada belum jelasnya bagaimana pengaruh belanja pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Wilayah Kalimantan. Meskipun secara empiris belanja pemerintah dan PDRB cenderung meningkat serta IPM menunjukkan dinamika yang fluktuatif, perkembangan PMA dan PMDN belum menunjukkan pola yang seragam antarprovinsi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah ketiga variabel tersebut benar-benar berperan signifikan dalam mendorong investasi, baik PMA maupun PMDN, di Wilayah Kalimantan selama periode pengamatan.

Oleh karena itu, kajian empiris yang menganalisis pengaruh belanja pemerintah, PDRB, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap PMA dan PMDN menjadi penting untuk memahami arah dan kualitas pembangunan ekonomi di Kalimantan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Perkembangan Belanja Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, PMA, dan PMDN di Wilayah Kalimantan tahun 2017-2024?
- 2) Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap PMA di Wilayah Kalimantan tahun 2017-2024?
- 3) Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama terhadap PMA di Wilayah Kalimantan tahun 2017-2024?
- 4) Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap PMDN di Wilayah Kalimantan tahun 2017-2024?
- 5) Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama terhadap PMDN di Wilayah Kalimantan tahun 2017-2024?
- 6) Bagaimana perbandingan pengaruh variabel belanja pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Kalimantan tahun 2017-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Menganalisis perkembangan Belanja Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, PMA, dan PMDN di Wilayah Kalimantan tahun 2017-2024.
- 2) Menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap PMA di Wilayah Kalimantan tahun 2017-2024.
- 3) Menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama terhadap PMA di Wilayah Kalimantan tahun 2017-2024.
- 4) Menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap PMDN di Wilayah Kalimantan tahun 2017-2024.
- 5) Menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama terhadap PMDN di Wilayah Kalimantan tahun 2017-2024.
- 6) Menganalisis perbandingan pengaruh variabel belanja pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Kalimantan tahun 2017-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan wawasan keilmuan di bidang ekonomi, khususnya dalam ranah ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain dalam memahami pola hubungan antara belanja pemerintah, PDRB, dan indeks pembangunan manusia terhadap investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai perbedaan pengaruh faktor-faktor ekonomi makro terhadap kedua jenis investasi tersebut di tingkat regional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kajian-kajian selanjutnya, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, untuk memperdalam analisis mengenai determinan investasi di wilayah strategis seperti Wilayah Kalimantan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti atau mahasiswa yang tertarik mengkaji fenomena serupa di masa mendatang. Hasil dan metode yang digunakan dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan, baik dengan memperluas periode dan wilayah kajian, menerapkan pendekatan analisis yang berbeda, maupun meneliti secara lebih mendalam pada salah satu jenis investasi, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya di tingkat daerah maupun nasional, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan realisasi investasi di Wilayah Kalimantan. Temuan mengenai pengaruh belanja pemerintah, PDRB, dan indeks pembangunan manusia dapat digunakan sebagai dasar dalam mengoptimalkan alokasi anggaran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja guna menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

c) Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai faktor-faktor ekonomi makro yang memengaruhi investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), di Wilayah Kalimantan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dan strategi investasi yang lebih tepat.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kalimantan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber resmi, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), serta sumber-sumber relevan lainnya yang mendukung kebutuhan analisis penelitian.

